

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KEGIATAN

**PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN DAN
PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH
TAHUN 2022**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan	: Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Organisasi	: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2022

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Struktur APBD menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, terdapat dua sisi penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi Pendapatan APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana Pertimbangan dari Pemerintah Pusat. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Mengelola PAD tidak akan lepas dari aspek perencanaan, pembangunan, pelayanan, monitoring, evaluasi serta penyusunan. Pengelolaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Manfaat dari suatu perencanaan adalah terciptanya arah dan sasaran yang tepat dalam pencapaian dari waktu ke waktu sebagai acuan dalam operasional instansi yang bersangkutan. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sangat diperlukan karena belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran PAD dari Pajak Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

[illegible]

